



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : EDI RIANTO
2. Jabatan : SEKRETARIS DAERAH
3. NHK : 216235

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 2.226.820.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/120 m2 di KAB / KOTA KEBUMEN, Rp. 768.960.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 151 m2/36 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 347.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/36 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
4. Tanah Seluas 1.680 m2 di KAB / KOTA KEBUMEN, HASIL SENDIRI Rp. 172.500.000
5. Tanah Seluas 1.050 m2 di KAB / KOTA KEBUMEN, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
6. Tanah Seluas 472 m2 di KAB / KOTA KEBUMEN, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
7. Tanah Seluas 1.467 m2 di KAB / KOTA WONOSOBO, HASIL SENDIRI Rp. 105.000.000
8. Tanah Seluas 1.136 m2 di KAB / KOTA KEBUMEN, Rp. 153.360.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 220.670.000**

1. MOTOR, YAMAHA MATIC Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 13.500.000



2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp.
10.800.000
3. MOBIL, TOYOTA AGYA Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp.
180.000.000
4. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp.
16.370.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	324.732.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	546.696.110
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.318.918.110

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 3.318.918.110

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.